

The Role Of The Communication And Information Service In Public Information Disclosure In Sidoarjo Regency

[Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sidoarjo]

Christa Diva Vernanda¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to analyze, and describe the role of the Department of communication and information Sidoarjo in public information disclosure by using a qualitative descriptive approach and data collection is done by observation, interview, and documentation. Research informants determined by purposive sampling techniques with informants head of Information Management and public communication and public relations institutions. To be able to find out how the role of the Department of communication and information can run information disclosure, because information disclosure is a crucial principle and one of the characteristics of the principle of good governance. Sidoarjo and Diskominfo were chosen because they showed seriousness in encouraging public information disclosure to the public, this can be seen from the results found that Diskominfo in the motivator indicator carried out desk review activities on the list of Public Information and on the domain facilitation dynamic indicator desa.id to encourage information disclosure, however, in the facilitator indicators, internal challenges such as employee loyalty that can affect the totality of performance and still lack of response to community participation are one of the challenges in information disclosure.

Keywords - The Role; Government; Public Information; Public Policy

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan mendeskripsikan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam keterbukaan informasi publik dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif serta pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan informan kepala bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pranata humas. Untuk dapat mengetahui bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menjalankan keterbukaan informasi, karena keterbukaan informasi menjadi asas krusial dan salah satu karakteristik dari prinsip good governance. Sidoarjo dan Diskominfo dipilih karena menunjukkan keseriusan dalam mendorong keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil yang ditemukan bahwa Diskominfo dalam indikator motivator melaksanakan kegiatan desk review terhadap daftar informasi publik serta pada indikator dinamisator fasilitasi domain desa.id untuk mendorong keterbukaan informasi, akan tetapi pada indikator fasilitator di temukan tantangan internal seperti loyalitas pegawai yang dapat mempengaruhi totalitas kinerja serta masih kurangnya respon partisipasi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam keterbukaan informasi.

Kata Kunci - Peran; Pemerintah; Keterbukaan Informasi; Kebijakan Publik

I. PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dibuat dan digunakan oleh setiap individu maupun kelompok, yang mana digunakan untuk mencapai suatu tujuan serta tindakan yang diinginkan. Tata kelola pemerintahan harus mampu menyediakan akses kepada publik agar mereka dapat berpartisipasi, yang membuat sistem kontrol masyarakat terhadap pemerintah dapat berlangsung. [1] Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban lembaga publik untuk menjalankan tugas pemerintahan. informasi publik adalah salah satu karakteristik praktik manajemen *good governance* yang baik, bahwa pemerintah adalah organisasi publik yang berkewajiban mengirimkan informasi publik kepada rakyat [2]. Keterbukaan informasi akan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Secara positif akan berkontribusi untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan efektif, karena pemerintah dan lembaga publik memberikan informasi yang jelas, transparan, dan bertanggung jawab tentang kegiatan mereka. Keterbukaan informasi publik selain mengatur kemudahan dalam memperoleh informasi, tetapi juga membuat masyarakat mengetahui tindakan dari pemerintah. Keterbukaan informasi publik bagi masyarakat memang ditujukan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia serta mendukung pemerintah dalam membuat keputusan yang strategis dengan pilihan yang jelas. [3]

Keterbukaan informasi publik adalah asas krusial dalam pengelolaan pemerintahan. Di Indonesia, terdapat peraturan perundang undangan Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menekankan pentingnya transparansi sebagai cara untuk meningkatkan akuntabilitas serta keterlibatan masyarakat melalui pemerintahan. Informasi yang bersifat publik adalah hak serta kebutuhan bagi setiap masyarakat, informasi publik harus dapat diperoleh dengan akurat dan faktual. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi publik. [4] Penerapan UU KIP mengikat kedua pihak, yaitu penyelenggara badan publik dan masyarakat, sehingga setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di Sidoarjo penunjukan PPID merujuk pada Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/474/438.1.1.3/2018 dimana bertugas untuk mengelola dan menyajikan informasi publik guna mempermudah akses bagi masyarakat. PPID memiliki kewajiban terkait layanan informasi, dengan melakukan pengklasifikasian informasi untuk disediakan oleh badan publik sifatnya secara berkala, serta merta, setiap saat, dan juga informasi dikecualikan. [5] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai aksesibilitas informasi publik dengan menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu PPID di Kab. Sidoarjo.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik dipakai sebagai tolok ukur untuk mengukur transparansi informasi di Indonesia yang dihitung secara teratur dan dikembangkan oleh Komisi Informasi Pusat. IKIP ialah salah satu program utama nasional yang diatur dalam UU KIP, dan diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJM Nasional tahun 2020 hingga 2024. Komisi Informasi pusat bertanggung jawab untuk menerapkan UU KIP dan menganalisis tingkat keterbukaan informasi publik secara nasional dan provinsi [6]. IKIP Indonesia tahun 2023 mencapai 75,40, meningkat 0,97 poin dari tahun 2022 (74,43), keduanya dalam kategori "sedang". Peningkatan skor didukung kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Skor IKIP dari 34 provinsi, 21 provinsi mencapai skor di atas rata-rata nasional meskipun 13 provinsi ada di bawah skor IKIP nasional, namun semuanya dalam kondisi sedang. Serta lima provinsi berada dalam kategori baik, contohnya Jawa Barat [84,43] dan Riau [82,43]. Sedangkan Provinsi Jawa Timur tahun 2022 memiliki skor sebesar [73,87] dan tahun 2023 memiliki skor [73,89]. Faktor penurunan skor dapat disebabkan oleh penurunan anggaran, walaupun tidak signifikan akan tetapi hal ini juga mempengaruhi keterbukaan informasi di Indonesia yang merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan.

Pada zaman modern saat ini, peran Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) krusial terhadap transparansi informasi di daerah karena memiliki peran strategis dalam memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat. Akan tetapi keterbukaan informasi di Sidoarjo dalam beberapa bagian juga harus tetap ditingkatkan, dikarenakan jika dalam pelaksanaan keterbukaan informasi sudah cukup baik maka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan Informasi. Karena kurangnya partisipasi dapat disebabkan oleh kurang transparannya para pemerintah. Dalam hal ini ditemui bahwa pada dokumen Diskominfo ada bagian yang belum sepenuhnya dapat dikatakan transparan yaitu dapat dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 menunjukkan beberapa indikator kinerja belum dijelaskan detail, terutama celah atau gap capaian kinerja. Apabila dilakukan akses ke situs Website Diskominfo Sidoarjo masih ditemukan belum adanya dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2024 yang membuat munculnya pertanyaan terkait bagaimana peran dari Diskominfo dalam keterbukaan informasi itu sendiri. Sebagai lembaga publik Diskominfo diketahui memiliki program bidang yang bervariasi mengacu pada renstra yang dikeluarkan Diskominfo tahun 2021-2026 terdapat 4 program salah satunya adalah bidang program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dari bidang tersebut didapatkan program kerja yang dijalankan untuk menunjang keterbukaan informasi di Sidoarjo dengan melakukan pembuatan aplikasi/web inovasi pelayanan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa fungsi dari Diskominfo Kab. Sidoarjo ialah dengan melakukan inovasi pada pelayanan publik dengan mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa aplikasi yang sudah diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1. Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik

No	Aplikasi
1	E-Buddy
2	Sp4n Lapor
3	112 Sidoarjo Call Center

Sumber: Hasil Olah Penulis, 2024

Dengan memanfaatkan TIK, Diskominfo memastikan bahwa kebutuhan informasi masyarakat dapat terpenuhi secara online, sehingga memudahkan akses informasi kapan saja dan di mana saja. Serta berbagai aktivitas

lain yang diadakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, seperti melaksanakan kegiatan peningkatan pengelolaan daftar informasi publik (DIP) yang melibatkan admin dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan PPID desa. Serta menyelenggarakan Rapat Desk Review untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik, yang bertujuan untuk peninjauan ulang dan pendampingan terhadap DIP. Di mana daftar informasi publik merujuk pada dokumen yang berisi keterangan terstruktur mengenai semua informasi publik yang dikuasai oleh lembaga publik.

Berdasarkan kegiatan diatas, penulis mengidentifikasi keterkaitan antara kegiatan desk review DIP dan inovasi aplikasi/web yang telah dilakukan oleh Diskominfo Kab. Sidoarjo adalah, setiap kegiatan memiliki perannya masing masing untuk menjangkau terlaksananya keterbukaan informasi, DIP berfungsi untuk menyajikan sebuah akuntabilitas yang mengarah pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan. Dengan hal ini DIP berjalan beriringan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan DIP sebagai penyedia data/dokumen yang dapat digunakan masyarakat dalam memantau kinerja dari setiap lembaga, berikut adalah dokumen yang termasuk dalam tatanan kerangka kerja SAKIP yaitu seperti: Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dll. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 88 Tahun 2021 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah, menyatakan bahwa sebuah rangkaian tersistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisan, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini berguna untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan/kegagalan program dengan menganalisis capaian kinerja. [7] Sementara dalam hal inovasi teknologi Diskominfo berperan untuk memfasilitasi berbagai aksesibilitas dan efisiensi dalam penyampaian informasi, karena hal tersebut adalah peran strategis Diskominfo dalam memfasilitasi akses informasi kepada masyarakat Sidoarjo.

Kegiatan lain yang dilakukan Diskominfo Sidoarjo adalah dengan melakukan pendampingan terkait domain desa.id pada setiap desa. Website desa adalah platform yang sangat penting untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan efektif, hal ini berisi sebuah informasi tentang kegiatan desa, potensi desa, dan layanan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam keterbukaan informasi di pemerintahan desa [8]. Diskominfo melakukan inovasi mulai dari percepatan fasilitasi pembuatan domain desa.id, pelatihan dan pengelolaan konten desa.id hingga pendampingan kepada perangkat desa dalam proses pengelolaan website. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan website desa dalam menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Berdasarkan data tahun 2024 dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab Sidoarjo dengan total kurang lebih 350 desa dan kelurahan yang ada di Sidoarjo, hingga saat ini baru setengahnya yang sudah memiliki domain desa.id atau sekitar 150 desa

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, Salah satu isu yang dihadapi oleh Diskominfo Kabupaten Sidoarjo adalah usaha untuk memperbaiki transparansi dalam informasi yang bersifat publik. Di antaranya adalah minimnya sumber daya manusia yang mumpuni hal ini berdasarkan bagaimana loyalitas pegawai belum sepenuhnya merata dan dapat mempengaruhi totalitas kinerja yang diberikan, serta adanya tantangan pada partisipasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi. Hal ini cukup berpengaruh terhadap bagaimana Diskominfo menjalankan perannya dalam keterbukaan informasi di Kab. Sidoarjo. Informasi publik adalah prinsip dasar dalam pengelolaan pemerintahan yang menekankan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk proses penentuan keputusan publik. Hal ini penting untuk melihat peran Dinas Komunikasi Dan Informatika terhadap keterbukaan informasi publik di Kab. Sidoarjo. Penelitian ini akan menentukan sejauh mana pemerintah daerah dapat menjamin akses masyarakat terhadap informasi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh, Mochammad Alfin Azrial Akbar, dkk (2024) dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengerti bagaimana cara pelaksanaan program informasi dan komunikasi publik Diskominfo di Kab. Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada efektivitas komunikasi pada penyelenggara kebijakan. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan karena keduanya menghadapi tantangan terkait dengan komunikasi dimana pada penelitian terdahulu keterhasilan program bergantung pada efektivitas komunikasi, sedangkan pada penelitian sekarang ditemui bahwa partisipasi masyarakat terhadap keterbukaan kurang kuat dimana hal ini juga berkaitan dengan komunikasi. [9]

Penelitian Kedua yang dilakukan oleh Lathifah Chairunnisa dkk (2023) dalam penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang”. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengaruh variabel yang berkaitan dengan konteks kebijakan berpengaruh dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP) di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Serang. Penelitian menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teori dari Merilee S. Grindle. Temuan pada penelitian ini mengindikasikan keberhasilan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik membutuhkan dukungan serta keterlibatan dari pihak-pihak terkait.

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang mengalami perbedaan karena penelitian terdahulu didapatkan hasil bahwa dukungan dari pihak-pihak terkait di butuhkan, diamana pada penelitian sekarang pihak-pihak terkait sudah memberikan kontribusi untuk mendorong keterbukaan informasi publik. [10]

Penelitian Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anggie Pandji Alam (2023) dalam penelitian ini berjudul “Efektivitas DISKOMINFO Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui PPID Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana Diskominfo berhasil untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui PPID Kota Medan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan penghambat. Penelitian menerapkan metode kualitatif deskriptif, serta mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa diperlukan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana, penyuluhan yang lebih intensif, serta peningkatan kualitas PPID di Kota Medan. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang mengalami perbedaan karena penelitian terdahulu difokuskan pada efektifitas Diskominfo untuk keterbukaan informasi dalam ranah PPID kota, sedangkan pada penelitian sekarang lebih berfokus pada peran yang dilakukan dari Diskominfo dalam keterbukaan informasi di Kabupaten Sidoarjo [11]

Penelitian Keempat, penelitian dilakukan oleh Alya Tiara Alvion (2022) dalam penelitian ini berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat”. Tujuan dari studi ini adalah untuk menggambarkan sejauh mana keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di Kab. Bandung Barat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif serta mengacu pada teori yang diajukan oleh Oliver. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Keterbukaan akses informasi publik di Dinas Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat masih belum berjalan secara optimal dan tidak memenuhi standar transparansi. Selain itu, komunikasi dan pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik juga kurang memadai, yang berujung pada dampak negatif terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan karena keduanya menghadapi tantangan terkait dengan partisipasi masyarakat karena kurang memadainya komunikasi dan sosialisasi. [12]

Berdasarkan referensi dari penelitian sebelumnya, perbedaan antara studi sebelumnya dan penelitian ini adalah terkait dengan fokus pada bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menjalankan keterbukaan informasi publik dengan adanya tantangan dari faktor sumber daya dalam ruang lingkup loyalitas serta partisipasi publik. Penulis menggunakan teori dari Pitana dan Gayatri (2005:95), dengan indikator, termasuk Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator. Terkait dengan isu yang telah disebutkan, maka sasaran penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) menjalankan perannya dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Kab. Sidoarjo, serta untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip yang berhubungan terhadap keterbukaan informasi publik dilaksanakan.

II. METODE

Dalam penelitian terkait “Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sidoarjo” adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, Metode penelitian kualitatif deskriptif ialah metode untuk menganalisis, menggambarkan, serta meringkas berbagai kondisi yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan jangka waktu penelitian dilakukan pada akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Dengan fokus penelitian adalah terkait dengan bagaimana peran Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO) dalam keterbukaan informasi publik di lingkungan Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan teori dari Pitana dan Gayatri dengan indikator motivator, fasilitator, dan dinamisator. Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode pemilihan informan yang dikenal sebagai purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk memastikan kebutuhan penelitian dapat terpenuhi. Informan yang dilibatkan meliputi Kepala Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta Pranata Humas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dengan para informan, dokumentasi serta studi literatur. Teknik analisis data melibatkan pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui secara dalam terkait bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terlebih kepada bidang pengelolaan informasi dan komunikasi dalam keterbukaan informasi publik di kab.Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada para informan untuk memperoleh berbagai informasi terkait. Penelitian ini juga terfokus pada indikator peran menurut Pitana dan Gayatri yaitu Motivator, Fasilitator, dan Dinamisator yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

Motivator

Menurut Pitana dan Gayatri motivator dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah daerah berfungsi sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dengan kewenangan yang signifikan, sehingga memberikan pengaruh besar dalam mendorong instansi sektoral untuk mendukung transparansi informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memainkan peran vital dalam meningkatkan aksesibilitas informasi publik di Sidoarjo. Melalui beragam program dan inisiatif, Diskominfo berusaha memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dan penting, sesuai dengan ketentuan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan temuan dari hasil wawancara, peran motivator yang dilakukan oleh Diskominfo dengan melakukan kegiatan sosialisasi atau rapat desk review dengan para organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap OPD memiliki sistem yang memadai dalam menyediakan informasi publik yang benar kepada masyarakat, kegiatan ini difokuskan pada peninjauan ulang dan pendampingan DIP dari masing-masing OPD. Karena penting memastikan bahwa data yang disampaikan kepada masyarakat memenuhi kriteria transparansi yang ditentukan oleh UU KIP. Kegiatan desk review DIP pada tahun 2024 dilaksanakan dua kali, pada kegiatan pertama pihak Diskominfo merasa belum mendapatkan hasil maksimal dari DIP pada setiap OPD yang membuat diperlukannya pelaksanaan kegiatan review kembali agar mendapatkan hasil akhir yang sesuai. Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama dengan Pranata Humas, yaitu:

"Untuk desk review DIP, tahun kemarin kami melaksanakan 2 dua kali. Desk review pertama, kita masih belum mendapatkan hasil akhirnya (DIP), maka dilakukan untuk kedua kalinya. Tahun ini masih terselenggara satu kali yaitu di bulan Januari kemarin, tapi nanti tetap ada evaluasi setiap tahun dengan monitoring dan evaluasi admin biasanya dilakukan di akhir tahun." - (11/03/2025).

Hal ini diperkuat oleh Kabid pengelolaan informasi dan komunikasi publik dimana pada kegiatan desk review yang telah menghasilkan DIP dari setiap OPD menjadi suatu tolak ukur bahwa para pihak terkait juga mengerti atau paham terkait dengan kebutuhan keterbukaan informasi publik itu sendiri, walaupun ditemukan bahwa adanya sedikit tantangan terkait dengan perlunya pendisiplinan kepada para pihak OPD tetapi hal tersebut tidak mengurangi kesadaran mereka bahwa kegiatan yang dilakukan juga menjadi pendorong untuk terus menjalankan keterbukaan informasi. Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai berikut :

"Kalaupun untuk OPD sangat paham ya, terkait keterbukaan informasi. Karena memang itu tuntutan. Memang perlu proses pendisiplinan, terkadang para pejabat terlambat dan sebagainya menyerahkannya kepada admin di OPD masing-masing. Peran kita sebagai PPID utama di Sidoarjo, mengingatkan mereka untuk "Ayo tertib, segera." terus kita dorong." - (11/03/2025)

Berdasarkan wawancara ditemui bahwa dengan kegiatan desk review DIP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbarui dan mengoptimalkan penyusunan DIP serta mendorong keterbukaan informasi, dimana kegiatan ini melibatkan 34 OPD dan 18 Kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD serta pihak desa. Pada kegiatan ini hasil review akan ditetapkan sebagai DIP dari setiap OPD di Kabupaten Sidoarjo, dimana daftar informasi yang sudah sesuai akan diupload pada masing-masing website dari OPD, akan tetapi masih ditemui adanya keterlambatan para OPD untuk menyerahkan kepada admin di masing OPD dalam melampirkan beberapa link terkait yang harus ada pada DIP setiap OPD. Serta Diskominfo juga terus melakukan evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap akhir tahun, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berikut adalah dokumentasi kegiatan desk review daftar informasi publik :

Gambar 1. Rapat Desk Review DIP



Sumber: Diolah dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab.Sidoarjo (2024)

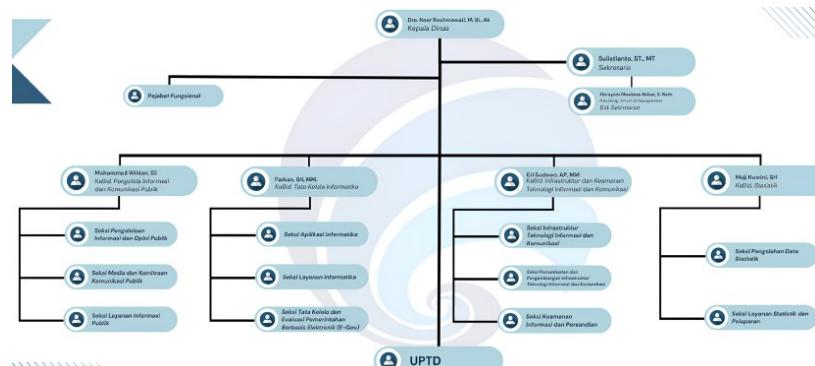
Berdasarkan gambar diatas bisa dilihat bahwasannya proses pengumpulan data daftar informasi publik dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Pertama pengumpulan Informasi yang dikoordinasi oleh PPID dalam pengumpulan seluruh informasi dari berbagai unit kerja dan OPD. Kedua adalah pengelompokan Informasi, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1, yang menyatakan: "Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang." (Republik Indonesia 2008) dari informasi yang sudah terkumpul, PPID melakukan identifikasi dan klasifikasi informasi. Ketiga, Sumber Informasi yang dikumpulkan harus berasal dari sumber resmi dan telah disetujui untuk dipublikasikan oleh pejabat unit yang berwenang, ini memastikan data yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang telah diklasifikasikan kemudian dicatat untuk menghasilkan daftar informasi publik (DIP). Melalui pembaruan DIP, dapat mendorong keterbukaan informasi dimana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan akses informasi. Berdasarkan penjelasan diatas ditemukan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo juga telah mengklasifikasikan informasi publik untuk menghasilkan DIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, yang mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Klasifikasi ini mencakup informasi setiap saat, secara berkala, serta merta dan informasi yang dikecualikan. DIP sendiri menjadi pedoman untuk pemantauan dan evaluasi oleh Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim) dan pada tahun 2024, Sidoarjo memperoleh skor 87,25 dengan predikat "menuju informatif," hal ini diharapkan dapat terus berkembang menjadi salah satu daerah dengan predikat "informatif" di tahun 2025 ini. Berdasarkan temuan didapati bahwa kegiatan desk review DIP berjalan dengan cukup baik walaupun dari segi ketertiban dari masing-masing OPD bisa ditingkatkan, karena kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi pada ruang lingkup pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbandingan hasil dari penelitian terdahulu dari Alya Tiara Alvion (2021) dalam penelitian berjudul "Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat". Dalam penelitian terdahulu didapati bahwa hubungan antara komunikasi dan pelaksanaan sosialisasi masih kurang efektif, dimana pada indikator motivator di penelitian ini tidak ditemukan adanya komunikasi yang kurang efektif antara para pemangku kebijakan dalam mendorong keterbukaan informasi dengan dilakukannya kegiatan desk review DIP itu sendiri.

Fasilitator

Menurut Pitana dan Gayatri Menurut Pitana dan Gayatri Fasilitator berfungsi pemerintah sebagai penyedia sarana yang mendukung pengelolaan. Sebagai badan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik, dan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, maka Diskominfo harus dapat memberikan fasilitas yang mendukung berbagai program dan aktivitas yang nantinya dapat mendorong transparansi informasi dengan konteks keterbukaan. Berdasarkan temuan, ditemukan fasilitator dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yakni anggaran serta sumber daya. Sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam setiap organisasi, dan sumber yang berkualitas menjadi salah satu faktor yang berdampak pada peningkatan mutu pemerintahan kepada masyarakat. [13] Dimana dapat kita lihat pada struktur organisasi yang berlaku, karena struktural yang sistematis dapat memberikan pengaruh kepada bagaimana suatu organisasi berjalan. Berikut adalah diagram struktur dari Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Sidoarjo yaitu

Gambar 2. Struktur Organisasi



Sumber: Diolah dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab.Sidoarjo (2024)

Berdasarkan gambar struktural diatas dapat dilihat bahwa Diskominfo memiliki empat bidang dengan tugas dan kewajiban yang berbeda yaitu bidang pengelola informasi publik, bidang tata kelola informatika, bidang infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang statistik Dalam hal ini semua bidang memiliki tugas dan kewajiban dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kab.Sidoarjo. Hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana para pegawai memahami peran terhadap tugas yang dijalankan, hal ini sesuai dengan pendapat yang di sampaikan oleh pranata humas. Berikut ini hasil wawancara dengan pranata Humas, yaitu

"Jadi kita semua tentunya berkinerja. Jabatan itu kan juga melekat pada tugas masing-masing. Kalau lulusan SMA sama S1 mereka itu sama untuk kembali lagi ke orangnya masing-masing, bagaimana memahami suatu pekerjaan itu. Maksudku lulusan SMA pun mereka banyak yang bagus, maksudnya yang berkinerja baik." - (11/03/2025)

Hal ini juga didukung dari wawancara dengan kepala bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dimana sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kinerja serta juga memiliki hubungan terkait dengan produktivitas, moralitas dan juga loyalitas. Menurut Kabid Pikom, beliau menyampaikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang bukan berarti selalu memiliki moral yang bagus. Dikarenakan pegawai dengan pendidikan SMA juga bisa memiliki loyalitas yang lebih bagus daripada yang berpendidikan S1, hal ini berarti membuat pendidikan akhir yang dimiliki setiap pegawai tidak serta merta meningkatkan kinerja / loyalitas itu sendiri. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kabid pengelolaan informasi dan komunikasi publik yaitu:

"Kinerja ada hubungannya dengan produktivitas dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, moralitas ada hubungannya dengan loyalitas. Nah, uniknya semakin tinggi pendidikan seseorang, itu tidak melulu moralnya bagus. Teman-teman pegawai yang masuk lewat jalur SMA Itu ini menurut pengalaman saya itu lebih punya etika. Lebih loyal dibanding dengan yang lulusan S1. Artinya, pendidikan itu tidak serta-merta meningkatkan kinerja, loyalitas, atau bahkan aspek-aspek moral. Kita berharap, bahwa tugas-tugas ke depan ini tidak hanya diisi oleh mereka yang educated, tapi juga yang loyal." - (17/04/2025)

Jika dijelaskan lebih lanjut maka produktivitas sendiri meningkatkan etika kinerja pegawai yang ditandai dengan ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, dan penyelesaian tugas secara efektif. Kesetiaan karyawan bukan hanya tentang melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan deskripsi pekerjaan, tetapi juga berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan dan memberikan yang terbaik bagi organisasi. [14] .Berikut adalah data jumlah pegawai serta pendidikan akhir dari bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik yaitu:

Tabel 2. Pendidikan Terakhir Pegawai Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Jumlah Pegawai Bidang PIKOM	Pendidikan Akhir	Pegawai
29 Pegawai	Sarjana	17 Orang
	SMA/Sederajat	12 Orang

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2024)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwasannya SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sidoarjo berjumlah 100 sekitar orang dengan 29 orang pegawai bekerja di bawah bidang Pikom. Dengan 17 pegawai berpendidikan akhir S1 dan 12 pegawai berpendidikan akhir SMA/Sederajat. Pada bidang Pikom para pegawai bekerja pada beberapa bagian tertentu yaitu seperti perantara humas, pengolah data, layanan informasi publik. Selanjutnya ada operator, komputer grafis, pengelola layanan operasional, penata liputan, dan pengelola pengaduan publik. Dimana para pegawai memiliki tugas untuk menunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut juga memungkinkan adanya loyalitas dari karyawan kepada organisasi yang belum sepenuhnya merata hal ini berdampak pada totalitas kinerja yang mereka berikan pada organisasi.

Selanjutnya faktor lain dari indikator fasilitator adalah anggaran. Anggaran adalah salah satu hal yang berhubungan dengan indikator fasilitator dikarenakan anggaran memiliki peranan yang sangat krusial dalam suatu sektor di sebuah lembaga karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengelola sumber daya finansial untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. [15] Proses penyusunan anggaran yang efektif harus mampu menggambarkan kebutuhan yang nyata, dan menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya berlangsung dengan maksimum, dan bidang Pikom mampu dalam memanfaatkan anggaran yang telah diberikan tersebut. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan pranata Humas, yaitu:

"Realisasi anggaran dari APBD adanya LRA 2023-2024-nya tercantum masing-masing anggaran perbidang yang ada di Diskominfo. katakanlah, bullet di bidang pikom, iya. Seperti anggaran untuk Aplikasi Diskominfo, program penguatan informasi dan komunikasi di seluruh. Tahun 2023 itu, yang jumlahnya ada tiga miliar sampai di- anggaran kita." - (11/03/2024)

Hal ini juga didukung dari wawancara dengan Kabid pengelolaan informasi dan komunikasi publik bahwa bidang Pikom sudah bisa memaksimalkan anggaran yang diterima karena pemaksimalan anggaran dilakukan dengan mengagendakan segala tugas yang diberikan. hal ini membuat anggaran menjadi efektif untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan [16] yang menyatakan bahwa anggaran refleksi dari prioritas yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kabid pengelolaan informasi dan komunikasi publik terkait dengan anggaran adalah sebagai berikut :

“Cara memaksimalkan, kita taat pada agenda yang ditugaskan nah antara output dan outcome ini, apakah sudah sesuai dan harus terukur? Kita evaluasi. Dan semuanya saya kira sudah efektif ya dengan anggaran segitu. Karena yang namanya efektivitas itu tidak hanya melalui masalah besar, kuantitas, tapi juga kualitas.” - (11/03/2024).

Serta anggaran yang dialokasikan dengan baik dan baik pula dalam pemanfaatannya dapat memudahkan berjalannya kegiatan-kegiatan yang berhubungan terhadap tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah data anggaran tahun 2023-2024 bidang Pikom yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Anggaran Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2023-2024

Tahun	Anggaran
2023	Rp. 3.395.703.930
2024	Rp. 2.869.265.200

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2024)

Berdasarkan tabel diatas terkait dengan anggaran yang diperoleh oleh bidang Pikom dapat dilihat bahwa anggaran yang didapatkan menurun dari anggaran tahun 2023. Berdasarkan penuturan dari Kabid bidang pikom anggaran yang diberikan tidak selalu sama tetapi ada di rentang anggaran 2-3 miliar rupiah. Penurunan anggaran terjadi karena agenda yang ditugaskan kepada bidang pikom tidak sebanyak di tahun anggaran 2023. Berikut adalah beberapa kegiatan anggaran tahun 2024 yang dilakukan oleh bidang Pikom yaitu pengelolaan terhadap media komunikasi, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, serta juga beberapa kegiatan pendukung seperti pendampingan penyusunan DIP, Monitoring dan evaluasi Lapor Sp4n, dan lain sebagainya. Hal ini juga menjadi suatu annual program yang dilakukan bidang Pikom terhadap berjalannya tugas dan sasaran yang ingin dicapai berkenaan dengan keterbukaan informasi. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dari teori peran menurut Pitana dan Gayatri dimana Diskominfo sebagai fasilitator dapat memberikan fasilitas yang dapat mendukung berbagai program/aktivitas yang dijalankan.

Dari uraian sebelumnya bisa disimpulkan bahwa, faktor sumber daya manusia dan anggaran merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi indikator fasilitator. Mengingat bahwa pegawai adalah elemen krusial dalam suatu organisasi. Pada temuan yang didapatkan dapat dijelaskan bahwa kinerja setiap pegawai juga menjadi salah satu tolak ukur lain dalam keberhasilan, produktivitas serta etika kinerja pegawai. Pada Diskominfo atau bidang pikom hal ini masih ditemui kemungkinan bahwa adanya loyalitas dari setiap pegawai yang tidak merata hal ini dapat berpengaruh pada totalitas kinerja yang di berikan. Karena menurut penuturan dari Kabid Pikom, pendidikan bukan serta-merta meningkatkan kinerja dan juga tidak serta meningkatkan loyalitas dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri yang dihadapai. Anggaran juga menjadi faktor penting lain dikarenakan jika pengelolaan anggaran tidak optimal maka segala tujuan yang sudah ditetapkan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal. Jika dibandingkan dengan hasil dari penelitian terdahulu dari Lathifah Chairunnisa dkk (2023) dalam penelitian berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang”. Didapati bahwa keberhasilan penerapan informasi publik memerlukan dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Dan dalam penelitian ini didapatkan temuan keterlibatan sumber daya yang berkaitan dengan sebuah loyalitas dari pegawai pada organisasi dapat berpengaruh pada totalitas kinerja yang diberikan, akan tetapi dalam hal anggaran sudah dapat dimaksimalkan dengan baik.

Dinamisator

Menurut Pitana dan Gayatri Dinamisator adalah terkait dengan bagaimana pemerintah daerah dalam mengintegrasikan antara swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kolaborasi yang baik, hal ini juga berlaku kepada OPD yang juga berperan sebagai pendorong utama pembangunan. Peran Dinamisator dalam tata kelola pemerintahan yang baik terwujud melalui kolaborasi antara masyarakat, sektor publik, dan sektor swasta. Hal ini dapat diwujudkan dengan, meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi yang bisa membuat para masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap informasi yang di publikasikan.

Berdasarkan wawancara ditemukan bahwa peran Diskominfo dengan melakukan kegiatan memfasilitasi pembuatan domain desa atau website desa.id dimana setiap desa yang ingin membuat website desa dapat bersurat kepada Diskominfo Sidoarjo yang nantinya akan dibantu dalam proses pengajuan kepada pihak pemerintah pusat atau kementerian komunikasi dan digital (KOMDIGI). Menurut penuturan dari pranata humas hingga saat ini jumlah domain desa dari total kurang lebih 350 desa di kota Sidoarjo sudah ada setengahnya yang sudah memiliki domain desa.id, sedangkan sisanya direncanakan akan diselesaikan di tahun 2025 ini. Berikut ini hasil wawancara dengan pranata humas yaitu:

"Domain desa yang punya domain-nya adalah Kementerian Kominfo. Jika ada desa yang mau membuat, mereka bersurat ke diskominfo untuk dibantu. Setelah domain jadi password username kita serahkan ke desa, untuk pengelolaannya kita juga ada pendampingan. Jadi, kita mengundang perangkat desa untuk pelatihan cara mengisi website desa. Terkait jumlah domain desa dari total kurang lebih 350 desa kita sudah separuh yang sudah punya, sisanya masih belum." - (11/03/2025)

Hal ini juga di dukung penuturan dari Kabid Pikom, dimana pembuatan domain desa dibutuhkan koordinasi, serta Diskominfo juga melakukan sosialisasi ke setiap desa terkait dengan domain desa.id, Diskominfo juga membantu mendampingi pengelolaan website desa.id. Dengan mengundang para perangkat desa untuk pelatihan terkait cara mengisi website desa salah satunya adalah dengan pelatihan konten untuk website desa.id untuk mempelajari terkait tata cara penulisan press release yang benar. Berikut ini hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik yaitu sebagai berikut:

"Jadi, ini sudah berkoordinasi secara bertahap tahun kemarin itu dilakukan koordinasi dengan pusat, pembayaran, setelah itu domain dan template tersedia. Nah, tahap selanjutnya menyiapkan SDM-nya. Jadi, kita undang mereka untuk dilatih. Serta kita terus mensosialisasikan, kepada sekitar lebih dari 300 Desa dan kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo. Kita butuh setahun untuk datang ke desa-desa." - (17/04/2025)

Website desa.id atau domain desa adalah situs resmi yang dibuat untuk setiap desa di Indonesia yang merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong digitalisasi di tingkat desa, dengan tujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa. Temuan yang didapatkan adalah Diskominfo juga memiliki tantangan terkait dengan bagaimana setiap desa perlu untuk memiliki admin atau tenaga khusus untuk pengoprasian website/domain desa dengan komunikasi publik yang baik. Berikut adalah dokumentasi dari pelatihan konten website desa.id yang dilakukan Diskominfo:

Gambar 3. Pelatihan Konten Website desa.id



Sumber: Diolah dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab.Sidoarjo (2024)

Dengan adanya website desa.id, warga Sidoarjo kini dapat mengakses informasi dari pemerintahan desa dengan lebih mudah. Website desa.id harus mencakup profil desa seperti geografis, demografi, sejarah, struktur organisasi, berita, kegiatan, laporan anggaran, dokumentasi, dan potensi wisata. Penggunaan website dikenakan biaya tahunan Rp50.000 yang dibayarkan ke Komdig. Sosialisasi juga dilakukan, meskipun ada tantangan dalam pemahaman teknologi di kalangan operator atau admin diharap tidak akan terlalu mempengaruhi kualitas konten yang di berikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Pitana dan Gayatri bahwa pemerintah daerah juga menciptakan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Mengenai partisipasi masyarakat, Partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan mutu layanan karena dapat mendorong akuntabilitas serta transparansi, yang pada gilirannya mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.[17] Setiap individu di negara ini berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan [18] Keterlibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan mampu memperkuat rasa kepemilikan dan kepercayaan terhadap pemerintah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah [19]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid pengelolaan informasi dan komunikasi publik ditemukan idealnya partisipasi masyarakat seharusnya meningkat, akan tetapi direalitanya ada kendala yang dihadapi seperti bagaimana partisipasi dari level desa tidak begitu kuat responnya. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keterbukaan informasi itu sendiri. Dimana idealnya seharusnya partisipasi dari semua tingkat meningkat yang didasari dari cukup banyaknya kegiatan yang mendorong keterbukaan seperti kegiatan desk review DIP, fasilitasi pembuatan domain desa.id hingga pelatihan konten website. Berikut wawancara dengan kepala bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai berikut:

"Idealnya harus ya, di realitanya sendiri ada kendala yang di hadapi, jadi, beberapa tahun ini kita sosialisasi ke masyarakat. Dan rupa-rupanya, kalau saya amati, di level desa responnya tidak begitu kuat. Saya berpikirnya begini, ini memang ranahnya pemerintah itu tidak lagi model pendekatannya top down, tapi harusnya bottom up. Dimana pemerintah itu peran dan fungsinya tidak lagi mendiktekan sesuatu ke masyarakat." - (17/04/2025)

Hal ini di perkuat dengan penuturan dari pranata humas, di mana partisipasi masyarakat pada beberapa tahun sebelumnya memang belum paham terkait dengan keterbukaan informasi, hal ini membuat Diskominfo melakukan sosialisasi untuk mengenalkan keterbukaan informasi itu sendiri. Dan dari hasil sosialisasi masyarakat sedikitnya mulai tahu terkait dengan keterbukaan informasi, walaupun hasil yang di dapatkan juga belum bisa dikatakan optimal karena jika dilihat dari data yang diterima di website ppid pada tahun kemarin hingga awal tahun ini ada sekitar 42 permohonan informasi yang ditujukan kepada berbagai OPD. Berikut ini wawancara dengan pranata humas diskominfo yaitu sebagai berikut:

"Partisipasi masyarakat jujur, saat ini memang masyarakat banyak yang masih belum tahu/paham. Terus kita sosialisasi jadi, akhirnya masyarakat mulai sedikit tahu. Apalagi saat ini kita di Kab Sidoarjo, sudah punya formulir permohonan informasi secara online, Kalau sosialisasi memang kita perlu melakukan sosialisasi terus untuk PPID. Permintaan informasi itu sendiri per tahunnya? tahun 2024-2025 ini ya, kayaknya ada sekitar 42 yang ditujukan masyarakat." - (11/03/2025)

Penyelenggaraan pelayanan Keterbukaan Informasi menjadi tanggung jawab dari semua pihak tanpa terkecuali PPID Kabupaten sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi publik [20]. PPID sendiri memiliki tanggung jawab untuk memberikan, menyimpan, mendokumentasikan, dan melayani informasi publik kepada masyarakat, sesuai dengan UU KIP. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan temuan bahwa, peran Diskominfo pada indikator dinamisator adalah dengan melakukan kegiatan pemfasilitasi pembuatan domain desa.id serta Diskominfo memberikan sosialisasi terkait website desa.id mulai dari pengelolaan dan konten yang ditampilkan. Pengelolaan website memiliki fokus utama untuk memberikan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, meskipun ada tantangan dalam hal pemahaman teknologi di kalangan operator. Selain itu di temui bahwa partisipasi masyarakat di Sidoarjo seharusnya bisa lebih tinggi, namun terdapat beberapa tantangan salah satunya adalah respon partisipasi yang kurang kuat dari masyarakat. Dan juga, dapat diamati bahwa pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi atau PPID baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, yang berpengaruh kepada respon terhadap partisipasi. Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbandingan hasil dari penelitian terdahulu dari Alya Tiara Alvion (2021) dalam penelitian berjudul "Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat". Didapati bahwa akses informasi belum berfungsi dengan optimal, serta komunikasi dan sosialisasi juga berdampak pada partisipasi masyarakat. Pada penelitian ini menyoroti adanya kesamaan dalam hal komunikasi dimana dapat mempengaruhi respon partisipasi masyarakat, terhadap keterbukaan informasi

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disimpulkan bahwa peran Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan cukup baik walaupun berdasarkan indikator peran menurut Pitana dan Gayatri masih terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan untuk diskominfo dalam penerapan keterbukaan informasi di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Jika ditinjau dari indikator teori peran menurut pitana dan gayatri adalah sebagai berikut: indikator motivator, menunjukkan bahwa Diskominfo telah melakukan kegiatan desk review daftar informasi publik (DIP) hal ini menunjukkan adanya motivasi yang diberikan oleh Diskominfo kepada para OPD hingga ke pihak desa yang ditujukan untuk mendorong keterbukaan informasi. Selanjutnya, indikator fasilitator terdapat dua faktor penting yaitu SDM serta anggaran pada faktor SDM ditemukan bahwa kinerja yang diberikan oleh setiap pegawai akan bervariasi, disebabkan oleh perbedaan tingkat loyalitas dari masing-masing individu terhadap organisasi. Pada faktor anggaran tidak ditemukan adanya tantangan karena anggaran sudah dapat dimaksimalkan dengan baik, yang terakhir adalah indikator dinamisator, pada indikator ini Diskominfo menjalankan kegiatan fasilitasi pembuatan domain desa.id yang diketahui hingga tahun 2024 baru

sekitar setengah desa dari total 350 desa dan kelurahan yang memilikinya. Serta ditemui adanya tantangan dari Diskominfo terkait partisipasi masyarakat yang tidak memberikan respon kuat terhadap keterbukaan informasi terlebih dari tingkat desa. hal ini menjadi fokus dari Diskominfo maupun bidang Pikom untuk mendorong transparansi hingga ketingkat pemerintahan desa. Berdasarkan kesimpulan diatas maka diharapkan dapat memberi pemahaman, pengetahuan, gambaran tentang peran Diskominfo dalam keterbukaan informasi publik di Kab. Sidoarjo.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan rekomendasi yang diharapkan mampu mendorong keterbukaan informasi di Kab. Sidoarjo. dengan melakukan kegiatan sosialisasi atau pelatihan seperti pelatihan literasi digital secara rutin yang di fokuskan pada seluruh opd hingga tingkat desa dan masyarakat terkait pemahaman kebutuhan keterbukaan informasi dan kebutuhan dalam peningkatan partisipasi publik, dengan model sosialisasi yang menggabungkan media digital atau menggunakan sistem yang saling terintegrasi seperti website, media sosial, portal PPID dan lain sebagainya dengan mengelola, menyebarkan serta berkoordinasi antar OPD dari berbagai tingkat hingga masyarakat, sehingga penyampaian informasi lebih terstruktur dan lebih terintegrasi. Atau dapat juga dengan melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik yang relate dengan lingkup hak akses keterbukaan informasi yang mengarah pada peningkatan respon partisipasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga saya atas doa dan dukungan yang menjadi sumber kekuatan selama proses penulisan artikel ini. Saya mengucapkan terimakasih kepada para dosen pembimbing dan dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial yang dengan sabar memberikan arahan serta bimbingan yang berharga dalam penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para responden yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, terlebih kepada Kepala bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta para Pranata Humas terkait yang telah merelakan waktunya untuk berkontribusi dalam penelitian ini. Tidak lupa saya ucapan terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan, kerjasama dan semangat yang sangat berharga sepanjang proses pengerjaan dari penelitian ini.

REFERENSI

- [1] B. G. Peters and J. Pierre, *Handbook of public policy*. 2006. doi: 10.4135/9781848608054.
- [2] S. Andriany and A. Ariyanti, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Dan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang,” *J. Ilmu Adm. dan Stud. Kebijak.*, vol. 6, no. 1, pp. 35–52, 2023, doi: 10.48093/jiask.v6i1.159.
- [3] D. A. Rahayu, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Komunikasi Publik Media Sosial Pada Kaum Milenial Di Kota Denpasar,” *J. Ilm. Cakrawarti*, vol. 7, no. 1, pp. 52–57, 2024, doi: 10.47532/jic.v7i1.982.
- [4] A. Riyanto, “Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *J. Huk. Pembang.*, vol. 42, no. 4, p. 381, 2012, doi: 10.21143/jhp.vol42.no4.270.
- [5] L. Nawawi and H. Sonjaya, Trisna, “Penerapan Keterbukaan Informasi Melalui Monitoring Dan Evaluasi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten,” vol. 2, no. 2, 2024, doi: DOI: <https://doi.org/10.61332/antasena.v2i2.241186>.
- [6] Ira Guslina, T. Mardiana, and N. Indriane, *Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik*. indonesia: Komisi Informasi, 2023.
- [7] M. Maringka, H. Sabijono, and C. Datu, “Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Pada Dinas Pariwisata Kota Manado,” vol. 8, no. 3, pp. 348–357, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosbudkum/article/view/55058>
- [8] P. Wijonarko *et al.*, “Pengenalan Website sebagai Media Informasi dan Promosi Desa Introduction,” vol. 2, no. 4, 2024, doi: <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i4.865>.
- [9] M. Alfin, A. Akbar, and I. U. Choiriyah, “Implementasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo,” pp. 1–9, 2024.
- [10] L. L. Chairunnisa, F. Habibi, R. Berthanila, F. Habibi, and R. Berthanila, “Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang,” *J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 11, no. 2, pp. 31–45, 2023, doi: 10.47828/jianaasian.v11i1.158.

- [11] A. Alam, "Efektifitas DISKOMINFO Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui PPID Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara," vol. 11, no. 1, pp. 1–15, 2023, [Online]. Available: <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017>
- [12] A. T. Alvioni, D. Miradhia, and B. Bonti, "Keterbukaan Informasi Publik DI Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat," *JANE - J. Adm. Negara*, vol. 14, no. 1, p. 152, 2022, doi: 10.24198/jane.v14i1.41278.
- [13] D. K. D. Ottay, A. J. Rorong, and D. L. Tampongango, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan Sario Kota Manado," *Jap*, vol. 8, no. 115, pp. 10–17, 2022. H. A. Nimir, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers," presented at 5th Int. Conf. on Fuzzy Systems, 1996, Cairo, Egypt. 1996.
- [14] M. Alamsyah and A. Saepudin, "Loyalitas Pegawai Di Lingkungan Kerja Pemerintahan Dinas Pemuda Dan Olahraga Jawa Barat," *Maeswara J. Ris. Ilmu Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 2, no. 2, pp. 01–05, 2024, doi: 10.61132/maeswara.v2i2.665.
- [15] R. R. Rahmadani, "Strategi Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Dari Anggaran Perencanaan Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kec.Lareh Sago Halaban," vol. 7, no. 11, pp. 20–24, 2024.
- [16] C. Rahayu, B. Damanik, V. A. Tanjung, and H. Anggraini, "Literature Review : Analisis Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Literature Review : Analysis of Budget Preparation for Regional Health Service Organizations," vol. 7, no. 8, pp. 3337–3346, 2024, doi: 10.56338/jks.v2i1.636.
- [17] R. R. Rahmadani, "Strategi Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Dari Anggaran Perencanaan Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kec.Lareh Sago Halaban," vol. 7, no. 11, pp. 20–24, 2024.
- [18] I. Affan, "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *LEGA LATA J. Ilmu Huk.*, vol. 6, p. 131, 2021.
- [19] Ni Wayan Desi Budha Jayanti, "Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia," *J. Contemp. Public Adm.*, vol. 3, no. 2, pp. 51–58, 2023, doi: 10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58.
- [20] S. Nelly, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik," *J. Sociopolitico*, vol. 6, no. 1, pp. 87–95, 2024, [Online]. Available: <https://fisipolupgriplk.ac.id/jurnal/index.php/JSP/article/view/119>
- [21] A. Savina, E. Yulyana, and L. D. Mahendra Putri, "Pelaksanaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang (Tantangan Dan Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik)," vol. 5, no. 4, pp. 6445–6450, 2024.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.